Kebijakan Kriminal Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak

Poetri Zamirah Prawidya Sari¹, Nurunnisa²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: poetrizamirah@gmail.com¹, nurunnisa@ulm.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan kriminal kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Dalam perlindungan anak sebagai pelaku kekerasan seksual diperlukannya keteguhan dari seluruh instrumen dan aparat hukum karena masa depan anak yang merupakan penerus bangsa adalah Tanggungjawab setiap orang dari lingkungan terdekatnya sampai kepada posisi pemerintah yang memegang peran pembentuk kebijakan. Kedua, demi menjunjung tinggi asas “yang terbaik bagi anak” maka perlunya diberlakukan secara aktif alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan, yaitu diversifikasi dengan metode mediasi lisan dan tertulis agar tercapainya kepastian hukum dan perlindungan anak.

Kata kunci: *Kebijakan Kriminal, Kekerasan Seksual Oleh Anak, Diversi, Mediasi*

Abstract

The aim of this research is to analyze criminal policies for sexual violence committed by children and to analyze legal protection for children who commit sexual violence. The method used in this research is a normative research method. The results of the research show that: Firstly, in protecting children as perpetrators of sexual violence, the steadfastness of all legal instruments and apparatus is needed because the future of children who are the nation's successors is the responsibility of everyone from their immediate environment up to government positions which play the role of policy makers. Second, in order to uphold the principle of "what is best for the child" it is necessary to actively implement alternatives for resolving cases outside of court, namely diversion using oral and written mediation methods in order to achieve legal certainty and child protection.

Keywords : *Criminal Policy, Sexual Violence by Children, Diversion, Mediation*

PENDAHULUAN

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2020 tercatat 702 kasus anak melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. berdasarkan data pengaduan kasus pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sepanjang Januari 2023 sampai dengan September 2023 terdapat 252 jumlah kasus anak sebagai korban kekerasan seksual, anak korban pornografi dan cybercrime sebanyak 31 kasus dan anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) sebanyak 33 kasus. Tiap tahun angkanya terus bertumbuh seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang berkembang pesat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan khususnya bagi layanan informasi yang menyasar kalangan pelajar, namun juga menimbulkan gejala sosial yaitu munculnya pelanggaran dan norma - norma, terutama norma kesusilaan masyarakat, yang mengarah pada peningkatan tingkat kejahatan yang

dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa, banyaknya jumlah film porno, buku porno dan situs porno yang beredar.

Peradilan Pidana Indonesia masih menggunakan pidana terhadap anak pelaku kejahatan, bahkan untuk kepentingan anak sekalipun dalam proses pidana berupa penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) masih banyak yang merekomendasikan pada hakim anak untuk menjatuhkan pidana terhadap anak-anak pelaku kejahatan dan lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian dan pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dipidana penjara atau rumah tahanan.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan dukungan dan kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik, maka ketentuan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak harus dilaksanakan secara khusus. Agar setiap anak kelak dapat mengemban tanggung jawab tersebut, sehingga perlu diberikan kesempatan yang luas untuk berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia, yang mana hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan anak, menjamin terpenuhinya hak-haknya dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Hal ini diinginkan dalam pengadilan bukan hanya untuk membuktikan kesalahan anak yang melakukan kekerasan seksual, tetapi juga mengapa seorang anak dapat melakukan kekerasan seksual dan mencari faktor apa yang membuat anak tersebut melakukan kejahatan dan hukuman bagi anak tersebut, supaya anak yang melakukan tindak kekerasan seksual tersebut sadar bahwa yang dilakukannya itu salah.

Upaya penanggulangan kenakalan anak tentu berangkat dari satu fenomena bahwa dalam masyarakat telah terjadi anak yang berperilaku bertentangan dengan norma- norma masyarakat pada umumnya dan norma- norma hukum pada khususnya.

Apabila di masyarakat terjadi kenakalan anak, maka akan muncul reaksi masyarakat. reaksi itu akan terarah pada upaya pemahaman terhadap fenomena kenakalan anak melahirkan pemikiran ke arah upaya penanggulangan terhadap fenomena kenakalan anak. reaksi masyarakat untuk menanggulangi fenomena tersebut dalam pembicaraan hukum pidana dan kriminologi disebut kebijakan kriminal.

Pengadilan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak berorientasi pada dimensi pidana pembalasan (teori retributive). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengedepankan pengalihan penyelesaian peradilan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Diversi dan Restorative Justice), yaitu keadilan yang penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kejahatan tersebut (bukan merupakan pengurangan tindak pidana). Pengaturan mengenai diversi tersebut juga bernafas sama dengan hadirnya pidana pengawasan yang ada dalam KUHP dan pengkhususannya untuk anak pada UUSPPA, hal ini dapat dilihat dalam pasal 70 KUHP ayat 1 huruf a dimana anak menjadi golongan yang dapat menjadi penerima pidana pengawasan beserta beberapa golongan yang sebisa mungkin tidak mendapat pidana penjara. Pidana pengawasan pada umumnya menurut KUHP ayat 70 ayat 2 huruf a, dapat dijatuhkan paling lama 5 tahun, sedangkan pada anak (UUSPPA), maka masa hukumannya paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.

Namun, yang menjadi jelas adalah anak pelaku kekerasan seksual tidak bisa mendapatkan diversi karena kejahatan kekerasan seksual yang terbilang adalah kejahatan yang tidak biasa. peraturan yang saat ini ada sudah cukup menjadi payung hukum bagi para korban kekerasan seksual walaupun dalam dunia anak memiliki perbedaan efek, tapi bagaimana dengan anak pelaku kekerasan seksual, bagaimana hak mereka dijamin untuk keberlangsungannya masa depannya.

Pada penelitian ini akan meneliti (1) Bagaimana kebijakan penal bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual?, dan (2) kebijakan non penal bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

METODE

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kaitannya dalam penerapannya dalam praktek. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Penelitian hukum ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak

Anak secara etimologi adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Kata "anak" dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata "anak" bersifat figuratif atau majasi. Kata "anak" dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia atau ibu dan bapak, tetapi juga menunjukkan asal lahirnya. Dalam bahasa Arab terdapat bermacam kata yang digunakan untuk arti "anak" sekalipun terdapat perbedaan yang positif dalam pemakaian-nya. Kata-kata "sinonim" tidak sepenuhnya sama artinya, taruhlah kata walad yang secara umum berarti anak, tetapi untuk anak yang dilahirkan oleh manusia atau binatang yang bersangkutan. Di samping itu terdapat kata ibnun yang artinya anak juga. Hanya ada perbedaan pemakaian dalam keduanya.

Fenomena anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di Indonesia, hal ini terjadi seiring tumbuhnya juga pengaruh teknologi dan dunia yang semakin tiada batas, hal inilah yang menjadikan fenomena anak yang menjadi pelaku kejahatan banyak terjadi di berbagai negara di dunia. Namun sangat sedikit penelitian yang menemukan alasan mengapa anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak meningkat secara kualitatif dan kuantitatif.

Pembicaraan konsepsi perilaku tindak pidana anak, dalam konteks hukum pidana dan kriminologi, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang siapa yang dimaksud dengan anak pelaku tindak pidana dan perilaku apa yang dikualifikasikan sebagai perilaku tindak pidana. Pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum pidana Perdata (BW) ayat (1) memuat batas anantara belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah dewasa (meerderjarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin atau pendewasaan (menurut Pasal 419 KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 bahwa "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Dari paparan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa di Indonesia ketentuan kriteria usia seseorang digolongkan sebagai anak yang tidak l2at asas, satu menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 21 tahun, namun pada sisi lain menentukan batas usia seseorang digolongkan sebagai anak adalah di bawah 18 tahun.

Jagat maya tengah dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak Taman Kanak-Kanak (TK) di Pekanbaru. Pelecehan tersebut dilakukan kepada teman sebaya dan disinyalir telah menonton video porno di ponsel ayahnya. Dr. Neny Nur Ainy Fardana MSi Psikolog, Pakar Psikologi Unair turut buka suara mengenai permasalahan tersebut. "Memang anak pada usia tersebut telah mengalami fase anal,

yaitu anak merasakan kepuasan untuk mengeksplor area anal dan sekitarnya. Mereka juga mulai mengenali konsep tubuh dan bagian-bagian tubuhnya. Hal ini merupakan hal alamiah yang dialami oleh anak. Namun, yang perlu ditekankan bahwa saat fase tersebut tidak ada hasrat seksualitas," paparnya pada *UNAIR NEWS* (31/01/2024).

Dalam konteks hukum pidana, terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan kekerasan seksual adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Tafsir terhadap perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya; termasuk pula persetubuhan. Namun di undang-undang hal-hal tersebut disebutkan tersendiri. Ini berarti dalam menafsir pengertian undang-undang bisa diartikan, segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment diartikan sebagai unwelcome attention atau secara hukum didefinisikan sebagai "imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments".

2. **Pemidanaan Bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya dapat meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau "criminal liability" atau "criminal responsibility" (bahasa Inggris) atau "strafrechtterlijke toerekening" (bahasa Belanda) atau "strafbaarheid" (bahasa Jerman) pertama-tama merupakan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan (tindak pidana) dan sanksi (pidana) yang sepatutnya dijatuhkan.

Selama ini, penanganan kasus tindak kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP, ada banyak pasal yang mengatur kekerasan seksual. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang merusak kesusilaan dan kesopanan (Pasal 281, 282, 283, 283 bis), pemerkosaan (Pasal 285, 286, 287, 288), pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295), memperdagangkan orang (Pasal 296, 297, 506), serta pemaksaan aborsi (Pasal 299).

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam

sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference.

Seperti juga halnya di negara-negara barat, praktik sistem peradilan anak memperoleh banyak kritik, karena sistem dengan keleluasaan kewenangan diskresi oleh hakim, maka anak maupun orang tua tidak lagi sepenuhnya didengar serta diakui hak-haknya. Banyak lembaga-lembaga yang semestinya tempat pembinaan tak lebih dari sebuah gudang, di samping itu anak-anak pun memperlihatkan kemakmuran bertambah, pendidikan lebih maju, sekularisasi dan individualisasi menimbulkan tuntutan, dan gerakan emansipasi, termasuk kelompok usia muda (anak dan remaja). Itu semua menunjukkan kecenderungan perlunya kepastian hukum bagi anak dan penekanan proses peradilan anak secara yuridis nor motif atau string disebut sebagai crime control model peradilan anak daripada welfare mod (model kesejahteraan).

Yang artinya perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Karena walau bagaimanapun anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia (SDM) bagi pembangunan nasional. Salah satu cara untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan melakukan diversifikasi atau restorative justice.

Kebijakan Non Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Diversifikasi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. "Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya

Keadilan restoratif (restoratif justice) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, restorative justice memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan, dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak

Menurut Tony F. Marshall restorative justice adalah a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future. Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

memecahkan masalah bagai- mana menangani akibat di masa yang akan datang.

Penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana anak, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi, dan jika gagal dalam upaya diversifikasi maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dengan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan penelitian kemasyarakatan. Jadi demikian penting laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas). Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) dituntut kualitasnya, sehingga data dan informasi yang akurat menjadi sumber penting dalam proses penyusunan Litmas sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan terbaik dalam proses penyelesaian tindak pidana anak.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan ini atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Selanjutnya dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut, atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Disinilah letak pentingnya laporan kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan.

Uraian di atas mulai tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, merupakan tahapan acara peradilan pidana anak. Seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pada setiap tahap pemeriksaan diupayakan diversifikasi, yaitu di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan pengadilan. Demikian penting dan wajib upaya diversifikasi itu dilakukan, baik oleh polisi, jaksa maupun hakim, agar anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dijatuhi pidana. Bahwa perampasan kemerdekaan dan pembedaan adalah upaya terakhir dari Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversifikasi bisa tercapai apabila ada kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban, dan pihak lain yang terkait, yang memerlukan proses dialog dan mediasi yang panjang untuk mencapai kesepakatan tersebut, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Kesepakatan pada umumnya lebih sulit diperoleh dari pihak korban/keluarga korban, karena merasa

dirugikan dan dikorbankan. Oleh karena itu peran tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum termasuk penasehat hukum sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada korban/keluarga korban tentang manfaat dan tujuan diversi.

Dalam penanganan perkara tindak pidana anak, mulai dari tahap awal sampai dipersidangan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan bahwa anak merupakan generasi penerus dan masa depannya masih jauh, sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena kekhususan tersebut, aparat penegak hukum dituntut kemampuan teknisnya dan memahami masalah anak dalam menangani tindak pidana anak. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan tehnik tentang peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana anak, sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan Undang-Undang.

2. Mediasi Lisan dan Tertulis Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Mediasi sangat sulit diberi pengertian. Dimensinya sangat jamak dan tak terbatas. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Dalam Perma No.1/2008, mediasi memiliki pengertian : "Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator" Mediasi merupakan proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan suatu pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan on Para masing - masing secara "pribadi" dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Mediasi memiliki beberapa prinsip dasar, nilai dan asas yang menjadi landasan filosofinya. Menurut David Spencer dan Michael Brogan, terdapat 5 (lima) prinsip dasar sebagai landasan filosofi mediasi merujuk pandangan Ruth Carlton. Prinsip dasar atau dasar filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Prinsip dasar pertama adalah Kerahasiaan (Confidentiality), yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.

Prinsip kedua adalah Sukarela (Volunteer), yaitu pihak yang bersengketa datang ke mediasi atas keinginan mereka sendiri secara sukarela, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

Prinsip ketiga adalah Pemberdayaan (Empowerment), yaitu orang yang datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak dan tidak dipaksakan dari luar.

Prinsip keempat adalah Netralitas (Neutrality), yaitu dalam mediasi seorang mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator saja, tidak boleh memihak salah satu pihak. Mediator tidak boleh bertindak layaknya seorang hakim yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak yang bersengketa.

Prinsip kelima adalah Solusi yang Unik (an Unique Solution), yaitu mediasi menghasilkan penyelesaian yang unik, tidak harus sesuai dengan standar legal. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak tanpa ada tekanan dari luar.

Pihak yang netral tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak Jainrya sehubungan dengan masalah-masalah yang

disengketakan, dan selanjutnya membantu para pihak melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. Hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (limited) atau tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, hakim anak dalam persidangan belum berperan secara optimal, karena belum semua pihak yang diatur dalam UU Pengadilan Anak dilibatkan. Hakim juga belum dapat berperanan sebagai pengganti ibu dan ayah anak nakal. Buktinya, pidana penjara mayoritas dijatuhkan kepada anak nakal di Indonesia. Padahal, secara teoretik maupun praktik, jenis pidana tersebut mempunyai banyak kelemahan, terutama terhadap masa depan anak. Pertimbangan-pertimbangan yuridis lebih dominan digunakan oleh hakim anak dalam menentukan putusan pengadilan. Dalam memerankan kewenangan di persidangan, hakim sering menghadapi hambatan, antara lain sulit menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh terdakwa anak karena tempat tinggalnya jauh dari pengadilan, dan berasal dari golongan ekonomi lemah, isi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kurang memberikan gambaran secara utuh tentang tersangka anak dan lingkungannya.

Mahkamah Agung perlu membuat ketentuan khusus persyaratan calon hakim anak yang operasional dan proses seleksi yang profesional. Ketua pengadilan negeri hendaknya saling berkomunikasi dan berkorespondensi dalam pengajuan permohonan hakim anak. Psikotes perlu dilakukan untuk mengetahui minat, perhatian dan dedikasi calon hakim anak terhadap anak nakal. Untuk itu, Mahkamah Agung perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap calon hakim anak maupun hakim anak, terutama tentang teknik beracara dan pengetahuan tentang filsafat dan hukum-hukum yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap anak nakal, baik hukum nasional, hukum internasional, atau hukum pidana asing.

Untuk meningkatkan peranan hakim anak, pedoman pemidanaan dapat digunakan sebagai salah satu sarana meningkatkan peranan hakim anak dalam memutus perkara anak nakal agar putusannya dapat mencerminkan perlindungan anak nakal. Pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan perlu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri secara berkala dan berkesinambungan berdasarkan pada perencanaan yang jelas dan matang dan koordinasi antara Lapas Anak dan Bapas.

Tumpang-tindihnya tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan perlu diselesaikan melalui perumusan norma yang operasional dalam undang-undang.

Proses mediasi tidak akan pernah berhasil apabila seorang mediator tidak memiliki strategi komunikasi yang baik, serta bisa mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri sebagai titik keberhasilan atas upaya damai yang dilakukan oleh mediator. Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa maupun persoalan yang dihadapinya. Mediator juga akan membantu para pihak mengidentifikasi masalah yang perlu dihadapi bersama. Selain itu, untuk menghasilkan kesepakatan, mediator harus secara bersamaan membantu para pihak yang bersengketa mengembangkan berbagai solusi penyelesaian sengketa yang tentunya pilihan penyelesaian sengketa itu harus bisa diterima dan memuaskan kedua belah pihak yang berperkara.

Seorang mediator mempunyai peran untuk membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing serta membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi para pihak. Mediator mempermudah pertukaran informasi, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta mengatur pengungkapan emosi. Mediator akan membantu para pihak dalam memprioritaskan masalah dan fokus pada pembahasan tujuan dan kepentingan bersama. Mediator juga sering bertemu langsung dengan para pihak. Sebagai forum informasi antara para pihak, mediator akan

memiliki lebih banyak informasi tentang perselisihan dan masalah daripada para pihak dan akan dapat menentukan apakah ada alasan untuk mencapai kesepakatan.

Persyaratan mediator yang disebutkan dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 yaitu setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Selain itu, mediator juga harus memiliki kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi serta memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pertanyaan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediasi sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu konsesus.

Diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan pengadilan. Implementasi diversifikasi ini disatu pihak melindungi anak, dimana pihak masyarakat atau korbanpun tetap terlindungi. Perlindungan terhadap korban pun tetap ada jika melihat syarat-syarat dan program-program diversifikasi yang harus dilakukan pada anak. Namun demikian tujuan utama implementasi diversifikasi adalah menghindari terhadap efek negatif proses peradilan pidana, dan digantikan dengan pembinaan di luar sistem peradilan pidana dengan mengikutsertakan masyarakat luas. Pidana penjara diletakkan dalam porsi paling terakhir dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini tercermin berdasarkan pengaturan Pasal 81 ayat(5), yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Hal yang paling menjadi dasar yang merujuk pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai salah satu determinan dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini tampaknya ingin lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan upaya-upaya perdamaian. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak perkara yang dimediasi, terutama di Pengadilan kota-kota besar yang pihak materil principal-nya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa mediasi secara langsung kepada pihak materil jauh lebih maksimal dan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian juga lebih besar. Karena itu, dapat dipahami mengapa Perma Mediasi menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perlindungan anak sebagai pelaku kekerasan seksual diperlukannya keteguhan dari seluruh instrumen dan aparat hukum karena masa depan anak yang merupakan penerus bangsa adalah Tanggungjawab setiap orang dari lingkungan terdekatnya sampai kepada posisi pemerintah yang memegang peran pembentuk kebijakan. Demi menjunjung tinggi asas “yang terbaik bagi anak” maka perlunya diberlakukan secara aktif alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan, yaitu diversifikasi dengan metode mediasi lisan dan tertulis agar tercapainya kepastian hukum dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tlada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Data Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023 KPAI*
- Fuad Mohd. Fachruddin, 1991, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Cet. I, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya
- Gary Goodpaster, 1995. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gatot Soemartono, 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- John M Echols dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. XXV
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni Bandung, Jakarta
- Makhrus Munajat, 2011, *Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena
- Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak, Pemahaman, dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 1 ayat (6)
- Ronni Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya* Nomor 27 Tahun X, Januari
- Steven Allen, *Kata Pengantar*, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Kebudayaan, 1991, hlm. 569 hasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kemendikbud
- Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice an Overview*, London: Home Office, Information & Publications Group